

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seluruh negara di dunia baik maju maupun berkembang tidak dapat melepaskan diri dari permasalahan percepatan pembangunan ekonomi. Sebab, pembangunan ekonomi pada dasarnya diperlukan untuk menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai tumbuhnya aktivitas perekonomian yang mengakibatkan bertambahnya barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraannya (Sadono, 2000).

Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan ekonomi jangka panjang serta merupakan fenomena esensial yang dialami dunia dalam beberapa waktu terakhir. Proses pertumbuhan ekonomi ini disebut *Modern Economic Growth*. Sebenarnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak hanya menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan, namun juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah. Ukuran berhasilnya pembangunan suatu daerah bukan hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga dari kemampuannya dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

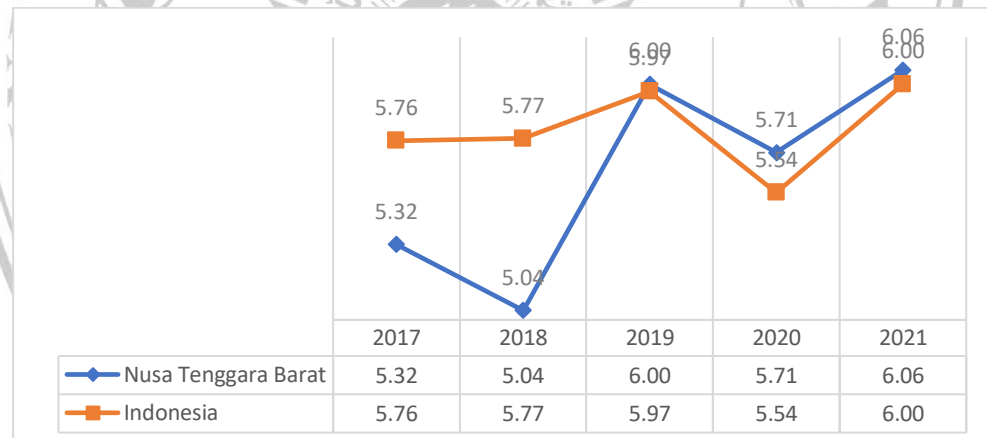
Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan jaminan bahwa setiap orang akan merasakan manfaat yang sama. Untuk mendapatkan ukuran yang dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan permasalahan sosial, sejumlah organisasi internasional seperti *World Economic Forum (WEF)*, *Asian Development Bank (ADB)*, dan *The United Nations Development (UNDP)* telah menciptakan serangkaian formula dan variabel untuk mengukur pertumbuhan ekonomi alternatif. Hal ini kemudian disebut pertumbuhan ekonomi inklusif.

Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang memerlukan peran serta seluruh pihak dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika perekonomian mulai tumbuh maka kemiskinan, ketimpangan dan

pengangguran akan berkurang (Klasen, 2017). Inklusifitas pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan ekonomi yang mewujudkan akses dan peluang seluas-luasnya dengan menarik semua kelompok masyarakat secara adil, kesejahteraan ditingkatkan, serta ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah dikurangi.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi inklusif menciptakan perekonomian yang besar yang memerlukan peran, partisipasi dan kontribusi seluruh masyarakat dan tentunya tanpa adanya diskriminasi antar masyarakat, hal ini akan menciptakan luasnya akses dan peluang yang dapat dirasakan oleh semua orang pada setiap lapisan masyarakat.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan indeks yang dihitung berdasarkan 3 pilar utama: pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, serta perluasan akses dan peluang.

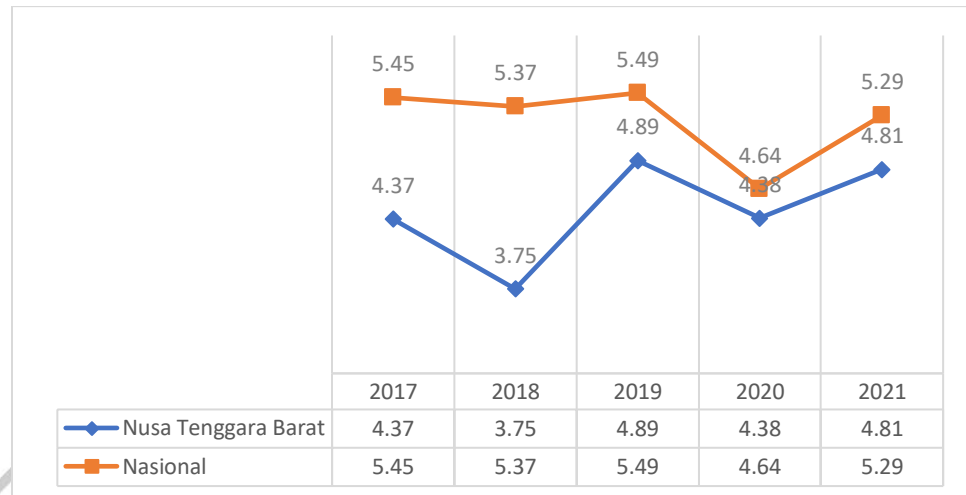


Sumber : Bappenas, data diolah 2023

**Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Nusa Tenggara Barat dan Indonesia**

Dapat dilihat dari gambar 1.2 bahwasannya nilai indeks Ekonomi Inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPEI nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat diakses oleh masyarakat luas. Pada gambar tersebut juga menandakan

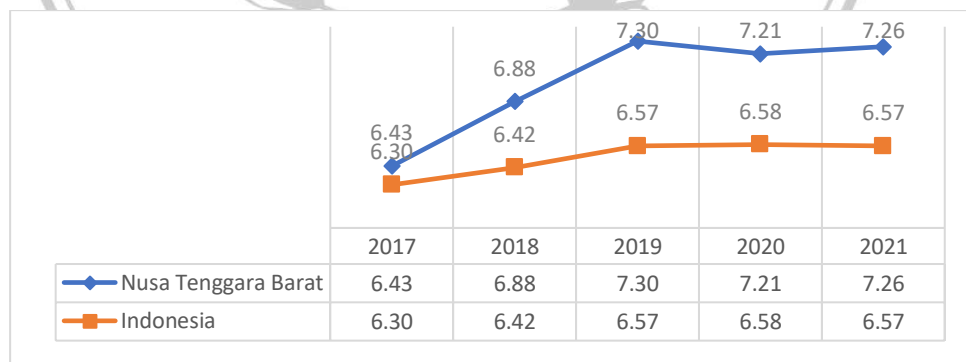
bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mampu memperhatikan tingkat pendapatan masyarakatnya juga memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung dalam mempercepat pencapaian tujuan pertumbuhan.



Sumber: Bappenas, data diolah 2023

**Gambar 1. 2 Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Indonesia**

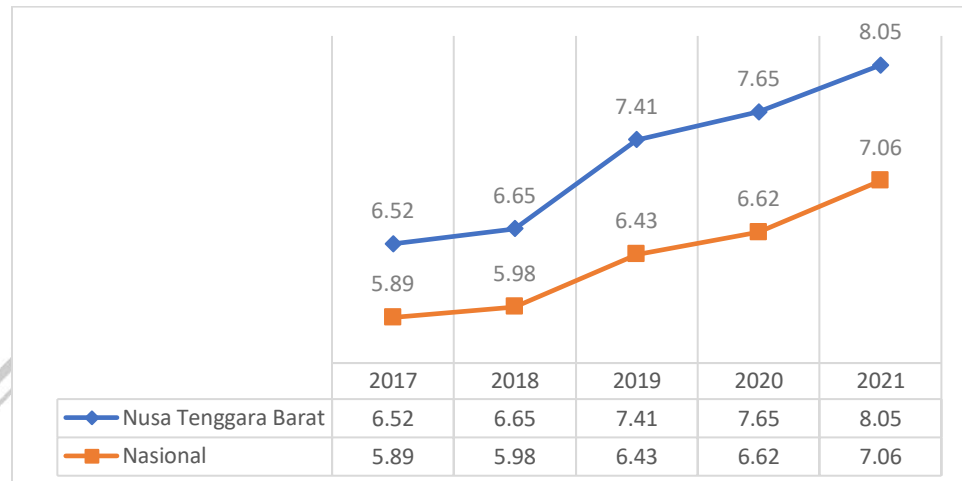
Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan pilar 1 dari indeks pembangunan ekonomi inklusif masih berada dibawah rata-rata nasional. Artinya dari aspek aktivitas ekonomi atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat NTB, tingkat produktivitas, akses dalam hal mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi masih belum baik secara nasional.



Sumber : Bappenas, data diolah 2023

**Gambar 1. 3 Pemerataan Pendapatan Dan Pengurangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional**

Gambar tersebut merupakan pilar 2 dari pertumbuhan ekonomi inklusif yang menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di NTB berada diatas rata-rata Nasional. Artinya, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di NTB sudah diupayakan secara optimal oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Sumber : Bappenas, data diolah 2023

#### **Gambar 1. 4 Perluasan Akses dan Peluang Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Dalam gambar 1.4 merupakan Pilar 3 dari IPEI yaitu perluasan akses dan peluang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam gambar menunjukkan bahwasannya nilai rata-rata Nusa Tenggara Barat lebih tinggi diatas rata-rata nasional. Artinya, tingkat pembangunan sudah lebih merata, sumber daya manusia lebih berkualitas dan sejahtera.

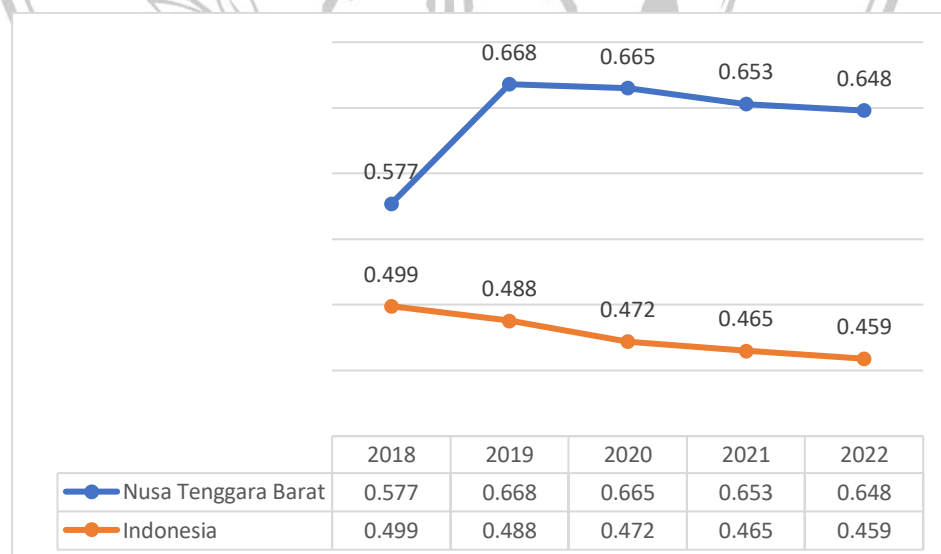
Berdasarkan data-data diatas menunjukkan bahwa indeks pembangunan inklusif tinggi, tingkat pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dikatakan baik, perluasan akses dan peluang sudah berada diatas rata-rata nasional, namun tingkat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih rendah dibanding rata-rata nasional. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif di Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya terjadi.

(Prasetyantoko et al., 2012) Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan untuk semua orang, tanpa memandang asal usul dan

perbedaannya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya mendorong pengentasan kemiskinan namun juga meningkatkan kesetaraan gender, seperti yang ditekankan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketidaksetaraan gender masih menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dimana masih adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal kebutuhan dasar manusia. Selain itu, kesenjangan dalam hal tingkat kesempatan tenaga kerja, aspek kesehatan yang merupakan indikator pilar ketiga dalam IPEI. Padahal, menurut (World Bank, 2000) kesetaraan gender ini akan memberikan kekuatan dan kemampuan suatu negara untuk berkembang bahkan dapat menekan angka kemiskinan. Gender juga merupakan penghubung antara peran sosial dan ekonomi. Kesetaraan gender akan memperkuat kapasitas negara-negara dalam pembangunan, pengentasan kemiskinan dan tata kelola yang efektif (Helwig et al., n.d.)

Kesetaraan gender merupakan prinsip dalam pelaksanaan SDGS (*Sustainable Development Goals*) yaitu *no one left behind*. Artinya, dalam tataran global pemerintah turut serta dalam mengimplementasi capaian-capaian yang tertuang pada tujuan SDGS terkait kesetaraan gender (Kemenpppa, 2022).



Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah 2023

### **Gambar 1. 5 Indeks Ketimpangan Gender di Nusa Tenggara Barat dan Indonesia Tahun 2021**

Gambar di atas menunjuk ketimpangan gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih berada diatas angka rata-rata nasional. Keadaan ini menunjukkan masih tingginya tingkat ketimpangan gender yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketidaksetaraan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menuju pembangunan ekonomi yang inklusif. Perekonomian yang kuat sangat bergantung pada peningkatan kapasitas SDM. Sumber daya manusia yang mahir dan berkualitas bisa ditingkatkan melalui pendidikan, kesehatan, serta ekonomi (Ramadhan & Setiadi, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel rasio rata-rata lama sekolah, rasio umur harapan hidup, dan rasio tingkat pengangguran terbuka untuk mempresentasikan gender. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) variabel rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, dan tingkat pengangguran terbuka mencerminkan aspek-aspek penting dari pembangunan manusia yang berkontribusi pada kesetaraan gender. Dengan adanya kesetaraan gender, kebijakan ekonomi dapat diterapkan dengan pandangan bahwa sumber daya publik yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi diinvestasikan pada pembangunan manusia. Selain hubungan pertumbuhan dan pembangunan manusia, salah satu faktor yang dapat mendorong ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah adalah struktur desentralisasi fiskal setiap daerah yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh dampak ketidaksetaraan gender dan kekuasaan pemerintah.

Sebagai wujud peran pemerintah, kebijakan desentralisasi fiskal tidak hanya bertujuan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Langkah-langkah desentralisasi fiskal sangat penting dalam analisis ini, karena kebijakan-kebijakan tersebut perlu menghasilkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang dapat memberikan manfaat yang adil dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Desentralisasi fiskal memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana transfer yang diberikan pemerintah pusat misalnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu desentralisasi fiskal disini memungkinkan pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD yang merupakan sumber utama pendapatan untuk pembangunan ekonomi yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan inklusif termasuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, peneliti menggunakan variabel Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Belanja Modal. Derajat desentralisasi fiskal merujuk pada sejauh mana otoritas dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah dimana hal ini dapat menentukan sejauh mana pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengelola dana transfer untuk pembangunan ekonomi daerah sedangkan belanja modal digunakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas, memperluas akses terhadap layanan publik seperti investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang pada gilirannya akan meningkatkan indeks pembangunan gender sehingga kesejahteraan meningkat dan tercapainya pertumbuhan ekonomi inklusif.

Kedua faktor ini saling berinteraksi dan mempunyai dampak yang saling melengkapi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Derajat desentralisasi fiskal menentukan sejauh mana pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk pengambilan keputusan pembangunan ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi lokal mereka, sementara belanja modal menentukan sejauh mana transfer daerah yang diberikan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur dan ketika dua faktor ini diintegrasikan dengan baik maka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Penguatan hubungan antar daerah penting dilakukan untuk mencapai pertumbuhan inklusif sehingga semua pihak dapat merasakan hasil perekonomiannya. Kebijakan otonomi daerah cenderung menjadikan

pemerintah daerah mempunyai cakupan yang lebih sempit, lebih efisien dan efektif, sehingga lebih mampu menanggapi kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan tercapainya kemandirian daerah yang tercermin dalam desentralisasi fiskal, maka kapasitas fiskal daerah dan ketahanan fiskal dapat memfasilitasi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti tertarik mengangkat topik dengan judul “**Analisis Pengaruh Pembangunan Manusia Berbasis Gender Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat**”. Penelitian ini hanya berfokus pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, selain pembangunan ekonomi inklusif yang belum sepenuhnya terjadi ternyata indeks ketimpangan gender di wilayah ini memiliki nilai tertinggi di Indonesia dimana hal tersebut perlu diperhatikan demi tercapainya tujuan dari inklusifitas pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga menambahkan variabel baru terkait tingkat pengangguran terbuka yang diprosikan dengan rasio tingkat pengangguran terbuka sehingga hal ini bisa dijadikan novelty. Berdasarkan pustaka yang telah diketahui bahwa banyak penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi, akan tetapi penelitian dengan konteks pertumbuhan ekonomi inklusif yang menggunakan pembangunan manusia berbasis gender dan desentralisasi fiskal sebagai determinan masih jarang diteliti sehingga hal ini menarik untuk diteliti atau penelitian ini juga dapat dijadikan penelitian yang novelty.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka terdapat rumusan masalah yaitu :

- 1) Bagaimana faktor gender yaitu rasio umur harapan hidup, rasio rata-rata lama sekolah, rasio tingkat pengangguran terbuka, faktor derajat desentralisasi fiskal yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio belanja modal mempengaruhi secara pasial pada inklusifitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat



- 2) Bagaimana faktor gender yaitu rasio umur harapan hidup, rasio rata-rata lama sekolah, rasio tingkat pengangguran terbuka, faktor derajat desentralisasi fiskal yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio belanja modal mempengaruhi secara pasial pada inklusifitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

**C. Batasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah, maka batasan masalah yang dipergunakan untuk menghindari terdapatnya penyimpangan atau perluasan pokok permasalahan supaya penelitian ini dapat terarah dan lebih berfokus dari pembahasan yang dimaksudkan, maka peneliti membuat batasan masalah yaitu permasalahan yang akan dibahas mengenai determinan pembangunan manusia berbasis gender (rasio umur harapan hidup, rasio rata-rata lama sekolah, rasio tingkat pengangguran terbuka) dan desentralisasi fiskal (rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio belanja modal) pada inklusifitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**D. Tujuan penelitian**

Pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka peneliti memiliki tujuan yaitu untuk menelaah pengaruh indeks pembangunan manusia berbasis gender dan desentralisasi fiskal terhadap inklusifitas pertumbuhan ekonomi.

**E. Manfaat penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan penulis dalam mendalami topik serta dapat memahami setiap masalah dalam bidang studi ekonomi pembangunan
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pengambilan keputusan serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif sejalan dengan tujuan

pembangunan berkelanjutan (SDGS) keberlanjutan termasuk dalam ketimpangan (ketimpangan pendapatan atau kesenjangan).

3. Diharapkan penelitian yang dilakukan memiliki manfaat serta dapat digunakan referensi untuk peneliti dimasa depan.

